

Indeks Pembangunan Manusia + Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023



Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id>



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2023

Volume 7, 2024

Nomor Katalog: 4102002.6308

ISSN/ISBN:-

Nomor Publikasi: 63080.24025

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 36 halaman

Penyusun Naskah: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penyunting: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembuat Kover: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penerbit: © BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sumber Ilustrasi: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2023
Volume 7, 2024

Pengarah:

Agus Salim

Penanggung Jawab:

Agus Salim

Penyunting:

Ariq Rizaldi Fadhlurrahman

Penulis Naskah:

Ghytsa Alif Jabir

Pengolah Data:

Ariq Rizaldi Fadhlurrahman

Ghytsa Alif Jabir

Penata Letak:

Ghytsa Alif Jabir

Gambar Kulit:

Ariq Rizaldi Fadhlurrahman

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 memuat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan komponen penyusunnya. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, antara lain kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, kemiskinan, pola konsumsi dan pengeluaran serta disparitas Indeks Pembangunan Manusia. Semoga publikasi ini dapat memberikan kontribusi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan partisipasinya serta kerjasama yang baik dalam pengumpulan data maupun dalam proses penghitungan dan analisisnya, sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 ini dapat diselesaikan. Saran dan kritik sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Amuntai, Desember 2024

Kepala BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Agus Salim

DAFTAR ISI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2023

Volume 7, 2024

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4. Sistematika Penyajian	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Perubahan Metodologi	5
2.2 Indikator Penyusun IPM	7
2.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia	9
2.4 Status Pembangunan Manusia	10
2.5 Pertumbuhan IPM	11
BAB III POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA	13
3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13
3.2 Disparitas Indeks Pembangunan Manusia	19
BAB IV CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA	23
4.1. Pembangunan Manusia Untuk Hidup Lebih Sehat dan Lebih Lama	23
4.2. Pembangunan Manusia Untuk Peningkatan Standar Hidup Layak	28
BAB V PENUTUP	33
5.1. Kesimpulan	33
5.2. Implikasi Kebijakan	33

<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Nilai Maksimum dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM 9
Tabel 2	Status Pembangunan Manusia berdasarkan Nilai IPM 10
Tabel 3	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022 21
Tabel 4	Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2020-2023 24
Tabel 5	Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2019 – 2023 30
Tabel 6	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019-2023 31

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP	6
Gambar 2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023	14
Gambar 3	Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023	15
Gambar 4	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023	16
Gambar 5	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2010-2022	17
Gambar 6	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023	18
Gambar 7	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Status Wilayah, 2023	19
Gambar 8	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023	20
Gambar 9	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan (jiwa/km ²), 2023	25
Gambar 10	Angka Morbiditas Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019-2023	26
Gambar 11	Persentase Penduduk yang Pernah Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2023	27
Gambar 12	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019 - 2023	28
Gambar 13	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019-2023	29
Gambar 14	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2019-2023	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi negara khususnya negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan karena banyak negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun masih gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan yang tinggi. Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan dengan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga tujuan dari pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seiring berakhirnya periode program Millennium Development Goals (MDGs) pada akhir tahun 2015, agenda pembangunan dunia dilanjutkan dengan konsep baru yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa tujuan yang secara eksplisit berkaitan dengan pembangunan manusia yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia, menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Untuk melihat bagaimana potret pembangunan di suatu wilayah, salah satunya dapat dilihat melalui indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut

mencakup kesehatan; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan manusia harus dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki visi yaitu terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta berakhlak mulia, yang ditunjang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berperan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu penyedia data menerbitkan publikasi berjudul Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023. Dengan adanya publikasi ini, diharapkan dapat membantu baik Pemerintah maupun masyarakat dalam memonitoring dan mengevaluasi pembangunan yang telah dilakukan serta dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah untuk pembangunan yang akan datang.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- b. Memperoleh gambaran tentang perkembangan indeks pembangunan manusia dan indikator-indikator sosial lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Memperoleh gambaran disparitas indeks pembangunan manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Merumuskannya implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi:

- a. Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi: harapan hidup (longevity), pendidikan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living).
- b. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- c. Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- d. Analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- e. Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan hasil analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN mengulas latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan sistematika penyajian.

BAB II METODOLOGI mengulas konsep dan definisi, perubahan metodologi, variabel dan sumber data, tahapan penghitungan IPM, dan peringkat pembangunan manusia.

BAB III KONDISI SOSIAL EKONOMI mengulas kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, serta pengeluaran, pola konsumsi dan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA mengulas indikator penyusun IPM, serta disparitas IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan implikasi kebijakan

<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id>

BAB II

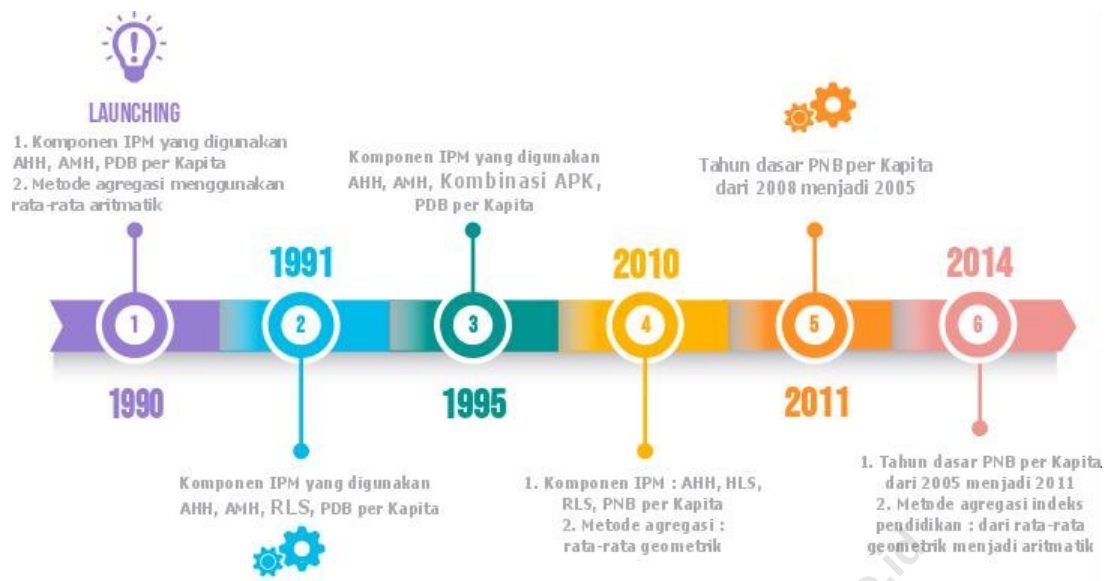
METODOLOGI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

2.1 Perubahan Metodologi

Pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Human Development Report 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan hidup saat lahir (UHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.



Gambar 1 Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat Lahir

AMH : Angka Melek Huruf RLS : Rata-rata Lama Sekolah

APK : Angka Partisipasi Kasar HLS : Harapan Lama Sekolah PNB : Produk Nasional Bruto

Pada tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan metodologi IPM. Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah:

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatika dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Oleh karena itu dalam penghitungan IPM yang baru terdapat beberapa perubahan, yaitu:

- a. Indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Umur Harapan lama sekolah (HLS).
- b. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diganti dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- c. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
- d. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatika menjadi rata-rata geometrik.

Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan Umur Harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu indikator PNB menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

2.2 Indikator Penyusun IPM

IPM merupakan indikator komposit. IPM disusun berdasarkan:

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan Umur Harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung Umur Harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling)/RLS dan harapan lama sekolah (expected years of schooling)/HLS. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

PENGELUARAN PER KAPITA

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin perbaikan ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun

produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

PPP_j = paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} = harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

m = jumlah komoditas

2.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Nilai Maksimum dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung dari rata-rata geometrik ketiga komponen penyusun IPM, yaitu :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{AHH} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.4 Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 2 Status Pembangunan Manusia berdasarkan Nilai IPM

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
(1)	(2)
≥ 80	Sangat Tinggi
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
< 60	Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.5 Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t + IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM(t-1)$ = IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

BAB III

POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA

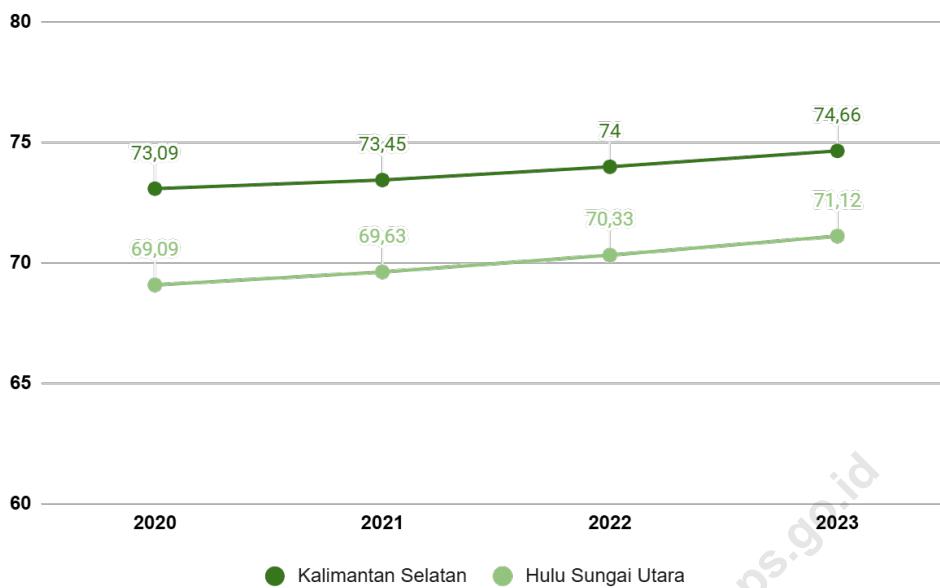
Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat daerah untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi faktor yang menentukan dalam menjamin kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Salah satu misi yang tertuang dalam dalam Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berperilaku cerdas serta berbudi pekerti luhur dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencerminkan kinerja pembangunan manusia. IPM juga merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 adalah sebesar 71,12 atau meningkat sebesar 0,79 poin (1,12 persen) dari tahun sebelumnya. Angka tersebut termasuk dalam peringkat kinerja pembangunan manusia kategori “tinggi”. Selama 3 tahun terakhir, IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu mengalami peningkatan pertumbuhan IPM, di kisaran 0,78 persen hingga 1,12 persen. Peningkatan yang terus terjadi setiap tahun mengindikasikan bahwa strategi pembangunan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah berdampak positif pada pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pembangunan manusia.



Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu lebih rendah. Lebih lanjut, selama periode 2020-2021, Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk kedalam kategori “rendah”. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara naik menjadi kategori “tinggi”. Hal ini merupakan keberhasilan proses pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

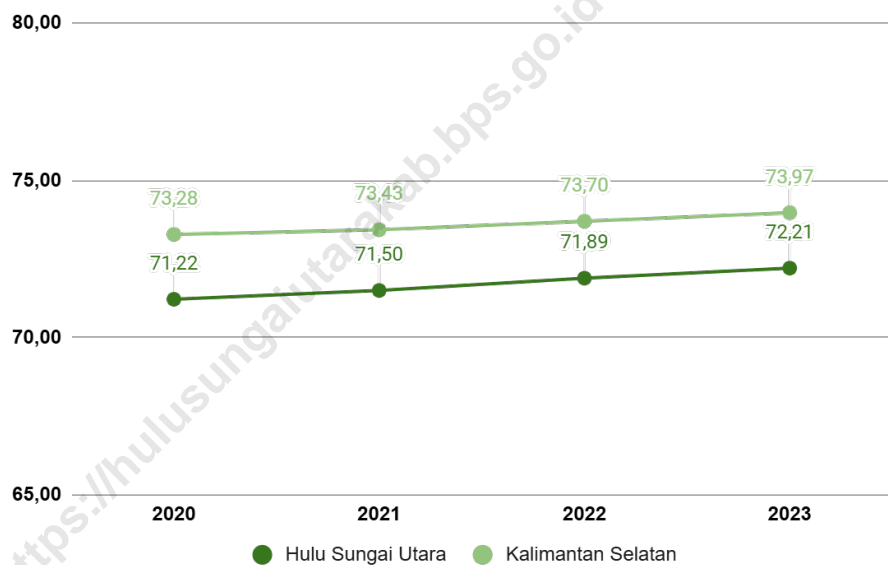
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga komponen pembentuk IPM, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran per Kapita. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, komponen penyusun IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ketiga komponen penyusun IPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator untuk mengukur dimensi umur panjang (a long and healthy life). Dalam penghitungan IPM digunakan Usia Harapan hidup waktu lahir (e_0) yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah

dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan, dan lainnya.

UHH saat lahir di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 adalah 72,21 tahun. Hal ini menggambarkan rata-rata penduduk Kabupaten Hulu Sungai saat lahir dapat menempuh hidup sampai umur 72 atau 73 tahun. Selama kurun waktu empat tahun (2020-2024), UHH selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat setiap tahunnya.



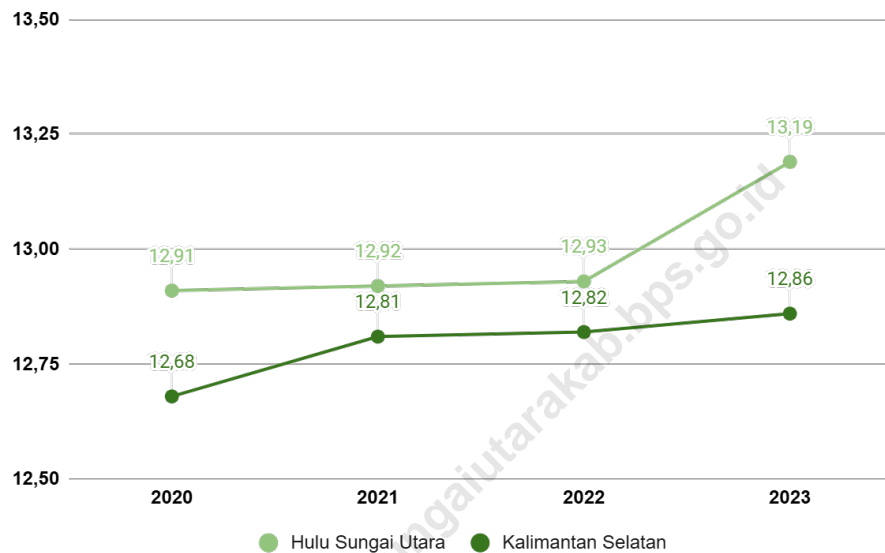
Gambar 3 Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023

Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Selatan, UHH Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berada di bawah rata-rata. Salah satu penyebab ketertinggalan Kabupaten Hulu Sungai Utara di bidang kesehatan yaitu minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia, seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, poskesdes, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, akses menuju fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu faktor pendorong rendahnya Usia Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) / expected years of schooling merupakan salah satu indikator untuk mengukur salah satu komponen pembentuk IPM yaitu dimensi pengetahuan. HLS dihitung diukur dari penduduk usia 7 tahun

keatas yang mempunyai harapan dapat bersekolah hingga 12 tahun mendatang (mulai jenjang SD hingga jenjang kuliah). Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Gambar 4 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023

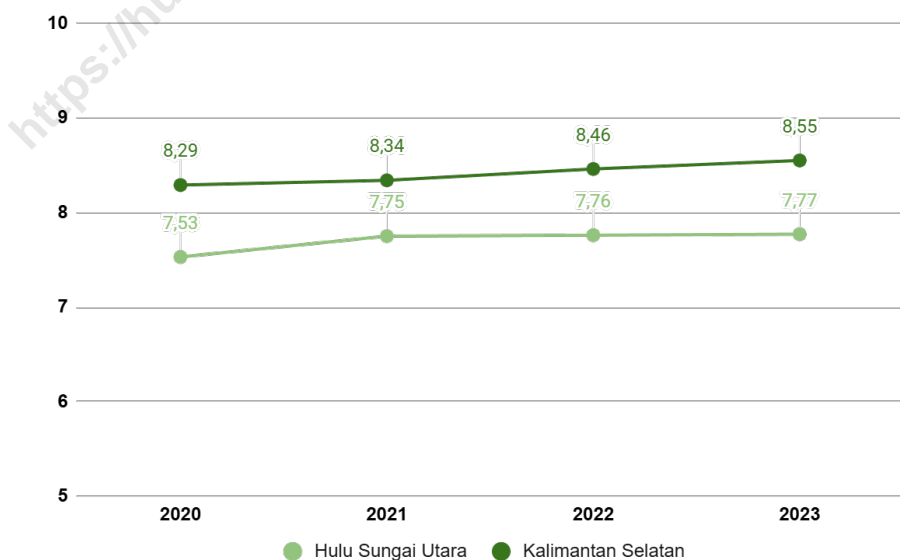
HLS di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 mencapai 13,19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 7 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan untuk dapat bersekolah hingga 13 sampai 14 tahun lagi atau setara dengan lulus jenjang pendidikan SMA.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, HLS Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Selama periode tahun 2020 hingga 2022, HLS Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan yang sangat kecil, hanya tumbuh 0,01 poin per tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,26 poin. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup berhasil dalam meningkatkan program pendidikan di bidang harapan lama sekolah. Selain itu, peningkatan angka ini juga menunjukkan kesempatan anak usia sekolah mengenyam pendidikan formal di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun semakin besar.

Rata-rata lama sekolah (RLS)

Selain Harapan Lama Sekolah (HLS)/expected years of schooling, Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/mean years of schooling juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur salah satu komponen pembentuk IPM yaitu dimensi pengetahuan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Pada tahun 2023, angka RLS di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 7,77 atau terjadi peningkatan sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata mengenyam bangku pendidikan sampai 7 hingga 8 tahun atau setara dengan kelas VII hingga VIII SMP. Selama tahun 2020-2023, terjadi peningkatan RLS dari 7,53 tahun menjadi 7,77 tahun atau meningkat sebesar 3,19 persen. Peningkatan ini dimungkinkan adanya kesadaran dari penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan melalui sekolah program kejar paket.

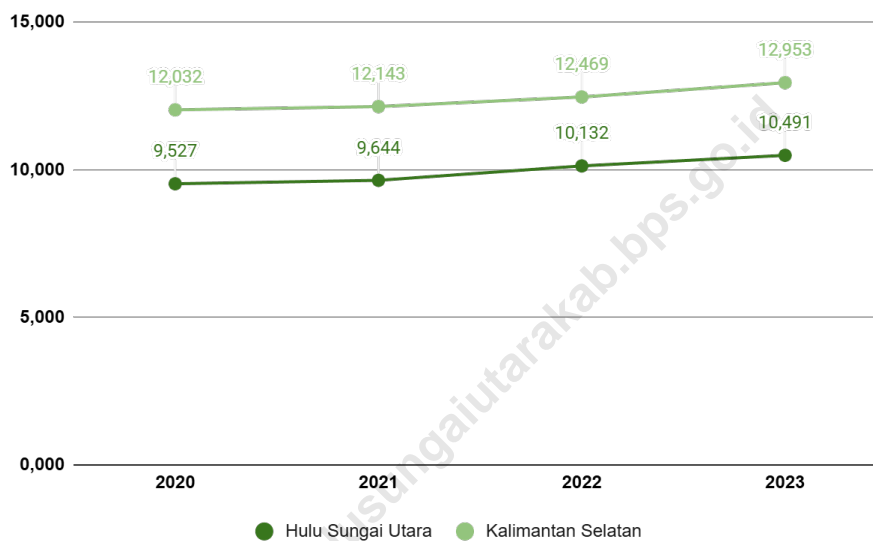


Gambar 5 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2010-2022

Walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya, angka RLS di Kabupaten Hulu Sungai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus pemerintah.

Pengeluaran per kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita merupakan indikator untuk mengukur dimensi standar hidup layak (decent standard of living). Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak perbaikan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran per kapita, semakin tinggi tingkat kemakmuran seseorang.



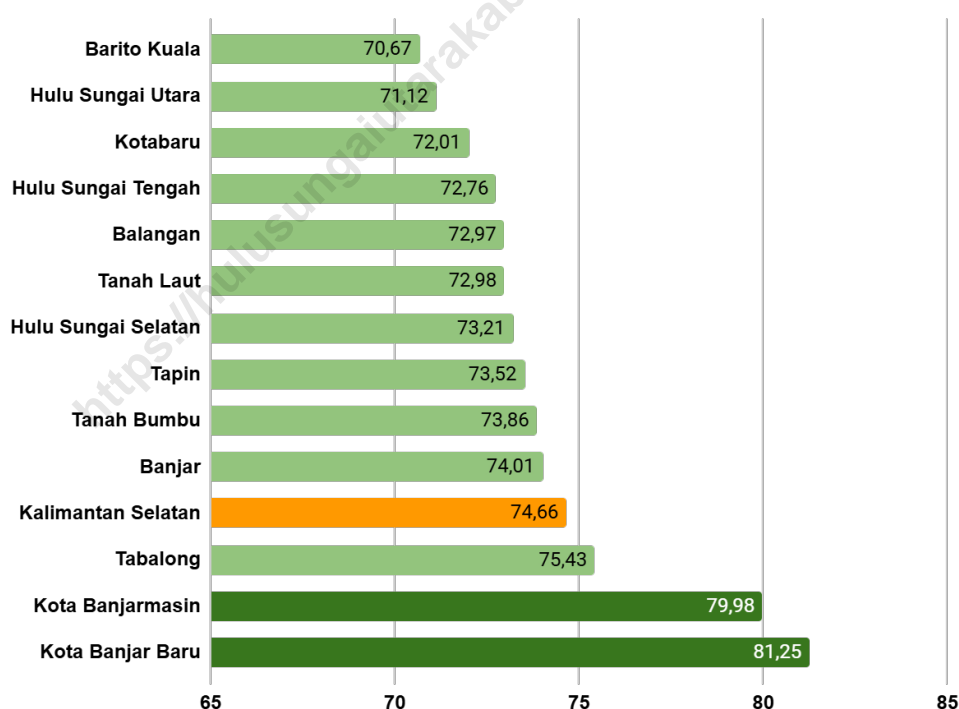
Gambar 6 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020-2023

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan selama tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar Rp. 12.953.000 per orang per tahun atau tumbuh 3,88 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 sudah tidak lagi mempengaruhi kegiatan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sisi lain, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara menduduki peringkat terendah di antara 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar. Untuk itu, pemerintah harus menerapkan program-program kebijakan yang tepat sasaran untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meminimalkan ketimpangan yang ada.

3.2 Disparitas Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Kalimantan terdiri dari 2 wilayah kota dan 11 kabupaten. Wilayah kota merupakan pusat perekonomian di suatu provinsi. Hal tersebut membuat pembangunan di kota lebih maksimal dibandingkan dengan kabupaten sehingga memudahkan masyarakat kota untuk mengakses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sektor lainnya.

Tahun 2023, capaian pembangunan manusia yang paling tinggi untuk wilayah kota di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru yang mencapai 81,25. Sementara itu, capaian pembangunan manusia yang paling tinggi untuk wilayah kabupaten adalah Kabupaten Tabalong, yaitu 75,43. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki capaian pembangunan manusia yang paling rendah untuk wilayah kabupaten, yaitu sebesar 71,12.

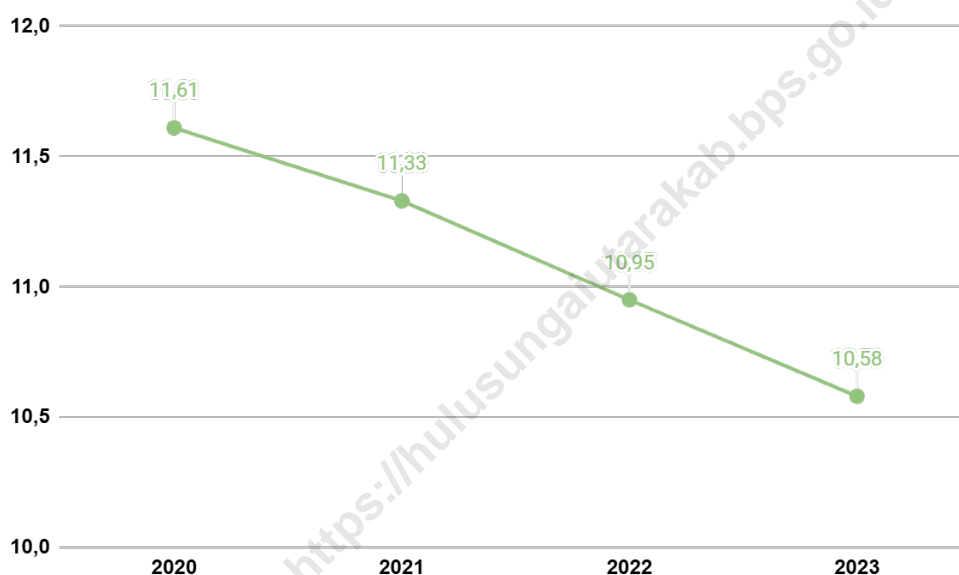


Gambar 7 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Status Wilayah, 2023

Perbedaan kemajuan antara kota dengan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan begitu terlihat. Pada tahun 2023, kedua wilayah kota, yakni Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin merupakan IPM paling tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara dari sebelas kabupaten, hanya ada satu kabupaten yang memiliki IPM lebih tinggi dari

IPM Provinsi, yaitu Kabupaten Tabalong, sedangkan sepuluh kabupaten lainnya bernilai dibawah Kalimantan Selatan.

Sejak tahun 2020, perkembangan disparitas yang terjadi antara kabupaten/kota yang memiliki IPM tertinggi dengan kabupaten/kota yang memiliki IPM terendah terus mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan ini adalah peningkatan IPM Kabupaten Barito Kuala lebih cepat dibandingkan peningkatan IPM di Kota Banjarbaru. Pada tahun 2023, pertumbuhan IPM di Kota Banjarbaru sebesar 0,53 persen sedangkan pertumbuhan IPM di Kabupaten Barito Kuala mencapai 1,14 persen dibandingkan dengan tahun 2023.



Gambar 8 Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2023

Fenomena disparitas antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan juga terjadi pada semua dimensi pembangunan manusia, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak. Jika dilihat dari komponen penyusunnya, hanya indikator harapan lama sekolah yang melebihi angka Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan indikator lainnya berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Usia Harapan hidup dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan angka terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang cukup, akses memperoleh obat-obatan, dan kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara

akan pentingnya kesehatan. Hal tersebut yang menyebabkan IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat posisi kedua dari terakhir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu difokuskan ke dimensi kesehatan dan kesejahteraan.

Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	71,36	71,86	72,33	72,98
Kotabaru	70,68	70,94	71,57	72,01
Banjar	71,67	72,4	73,25	74,01
Barito Kuala	68,65	69,08	69,87	70,67
Tapin	71,71	71,9	72,61	73,52
Hulu Sungai Selatan	71,57	71,93	72,47	73,21
Hulu Sungai Tengah	71,45	71,67	72,32	72,76
Hulu Sungai Utara	69,09	69,63	70,33	71,12
Tabalong	73,84	74,25	74,82	75,43
Tanah Bumbu	72,26	72,55	73,34	73,86
Balangan	71,28	71,58	72,2	72,97
Kota Banjarmasin	78,62	79,09	79,46	79,98
Kota Banjar Baru	80,26	80,41	80,82	81,25
Kalimantan Selatan	73,09	73,45	74,00	74,66

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ketertinggalan ini setidaknya masih memberikan peluang untuk menuju arah perbaikan. Pada umumnya, daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang rendah berpeluang untuk meningkat lebih cepat dibanding daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang sudah tinggi. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila strategi pembangunan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebijakan-kebijakan difokuskan untuk meningkatkan dimensi kesehatan dan standar hidup layak.

<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id>

BAB IV

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1. Pembangunan Manusia Untuk Hidup Lebih Sehat dan Lebih Lama

Peningkatan derajat kesehatan penduduk harus diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan, karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat. Kedua faktor tersebut harus sinergis, karena fasilitas kesehatan yang bagus tidak akan menjamin terciptanya masyarakat yang sehat.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif maupun kuratif melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi dan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan dapat dilakukan sedini mungkin, sejak bayi masih dalam kandungan, saat kelahiran dan masa balita. Perkembangan otak sudah dimulai sejak bayi berada dalam kandungan, dan gizi yang cukup serta perilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat sangatlah penting bagi kesehatan dan pertumbuhan seorang.

Tren Demografi

Dalam pembangunan, penduduk memegang dua peran sekaligus yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan. Untuk itu, pembahasan mengenai demografi penduduk akan memberikan gambaran awal mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

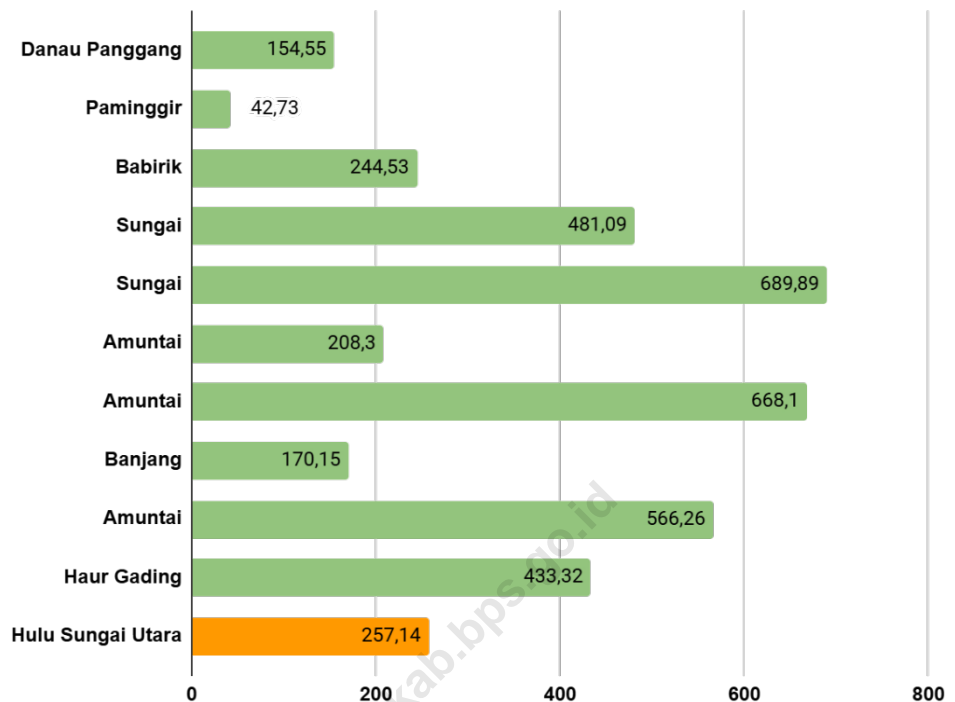
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2020-2023

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	112,99	114,46	115,90	117,31
Perempuan	113,33	114,64	115,94	117,21
Total	226,32	229,10	231,85	234,51

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2035 (Hasil Sensus Penduduk 2020)

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 berjumlah 234,51 ribu jiwa terdiri dari 117,31 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 117,21 ribu jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 2,66 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, sex ratio Kabupaten Hulu Sungai Utara 100,09 artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 hingga 101 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah 907,49 km², kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 sebesar 258,56 jiwa/km². Artinya, setiap satu km² wilayah dihuni oleh sekitar 258-259 penduduk. Penduduk paling padat terkonsentrasi di Kecamatan Sungai Tabukan. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Sungai Tabukan memiliki luas yang paling kecil di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan letak Kecamatan Sungai Tabukan cukup dekat dengan ibukota kabupaten. Disisi lain, Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu sebesar 40,57 jiwa/km² sebagai tempat tinggal walaupun memiliki luas wilayah yang cukup besar.

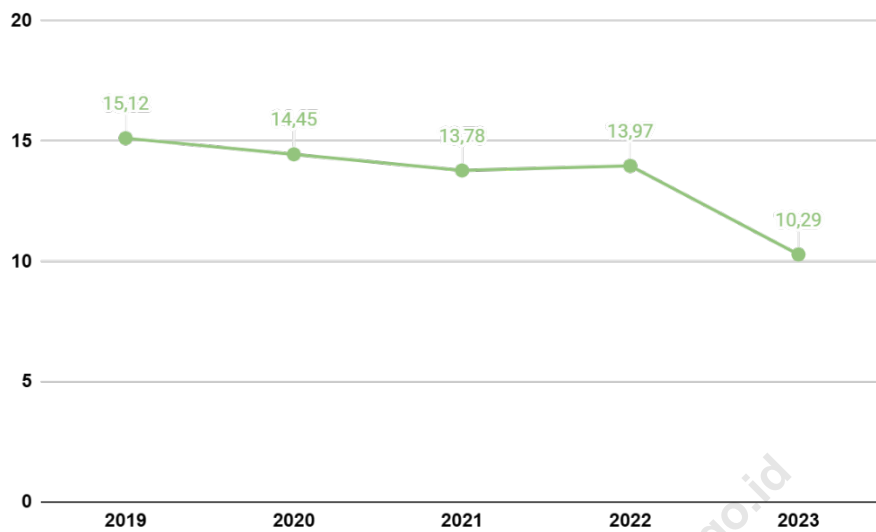


Gambar 9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan (jiwa/km²), 2023

Aspek Kesehatan

Salah satu indikator yang dapat menjelaskan derajat kesehatan adalah angka morbiditas. Angka morbiditas adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kesehatan sehari-hari. Semakin tinggi morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk.

Pada tahun 2023, angka Morbiditas Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 10,29 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk ada 10 hingga 11 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitas sehari-harinya terganggu akibat keluhan tersebut. Selama lima tahun terakhir, angka morbiditas Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami fluktuasi.



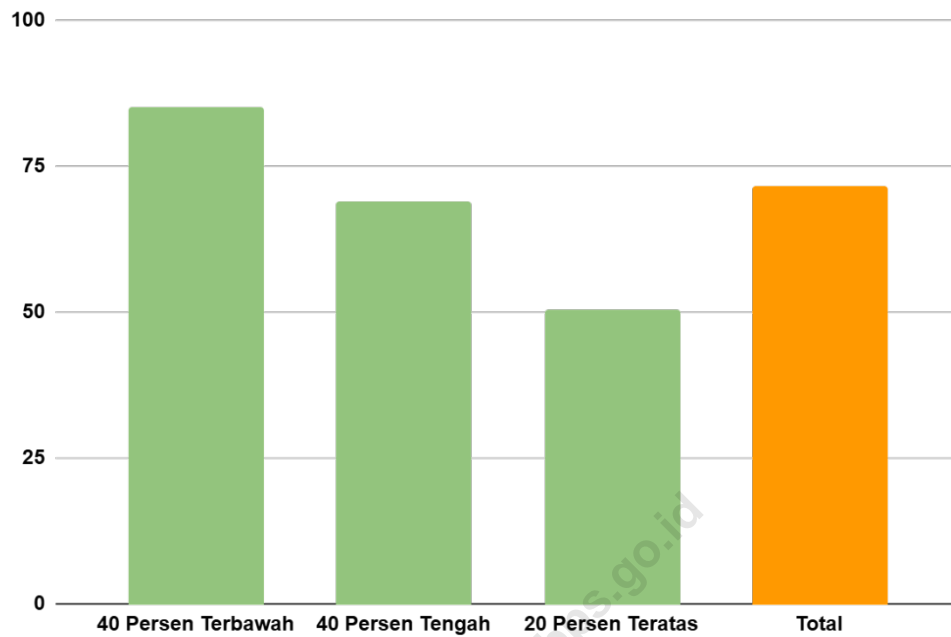
Gambar

10
An

gka Morbiditas Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019-2023

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan kepesertaan jaminan kesehatan, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan. Upaya perbaikan kesehatan penduduk suatu daerah salah satunya dapat diketahui melalui informasi berupa indikator pemanfaatan jaminan kesehatan untuk melakukan rawat jalan selama sebulan terakhir.

Pada tahun 2023 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan sebesar 71,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, jika dilihat dari kelompok pengeluaran, penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah paling banyak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk rawat jalan, yakni sebesar 85,09 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang hanya sebesar 50,27 persen.



Gambar 11 Persentase Penduduk yang Pernah Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2023

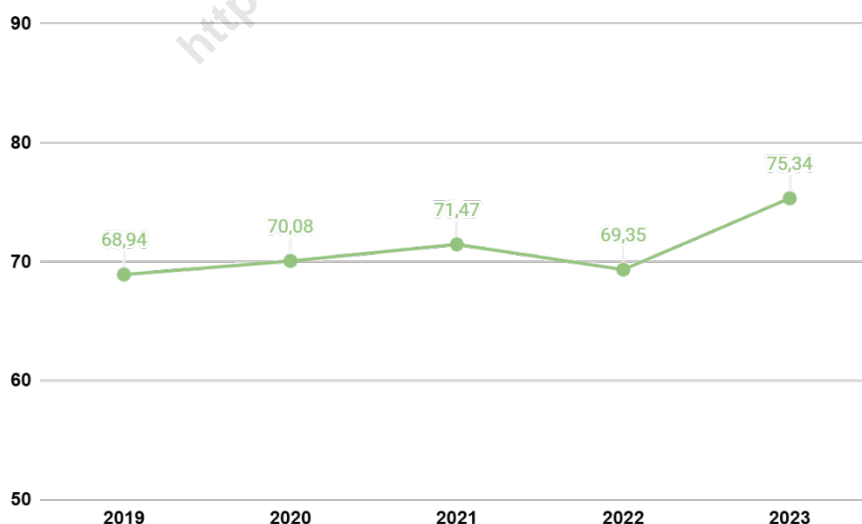
4.2. Pembangunan Manusia Untuk Peningkatan Standar Hidup Layak

Semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, akan mendorong peningkatan kualitas/standar hidup layak. Standar hidup layak berarti ada kemampuan finansial bagi rumah tangga untuk memenuhi dasar hidup, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota rumah tangga, khususnya anak-anak.

Ketenagakerjaan

Salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi adalah permasalahan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah harus diiringi dengan penambahan penyediaan lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja akan berdampak pada munculnya pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran mengindikasikan ketidakstabilan perekonomian di suatu daerah.

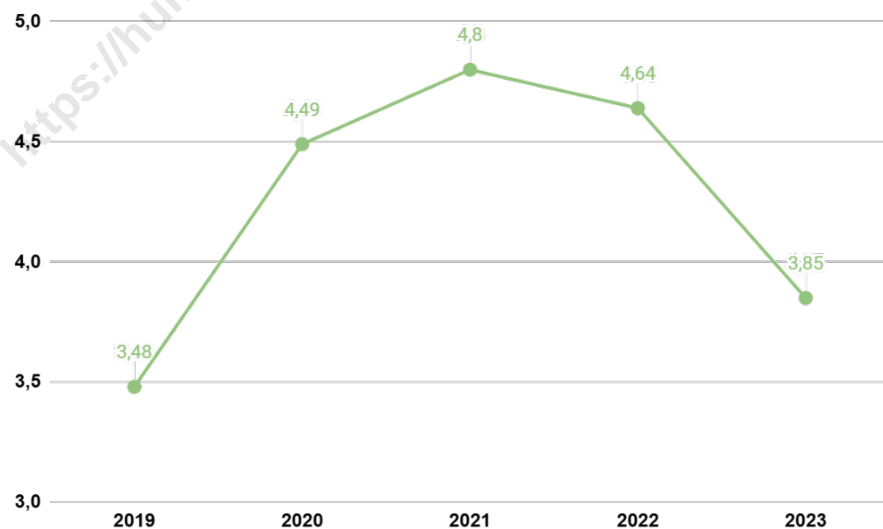
Secara umum penduduk dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Beberapa indikator yang mengukur tingkat ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).



Gambar 12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019 - 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja selama periode tertentu. TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tren naik, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali naik ke angka 75,34 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk berusia 15 tahun keatas, 75,34 persennya berstatus bekerja, sementara tidak bekerja ataupun pengangguran.

Selain TPAK, indikator ketenagakerjaan yang tidak dapat diabaikan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Yang dimaksud dengan pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. TPT merupakan perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk angkatan kerja.



Gambar 13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019-2023

Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 3,85 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja, 3 sampai 4 orang di antaranya adalah pengangguran. Selama kurun waktu lima

tahun terakhir (2019- 2023), TPT di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2021 TPT mengalami tren naik. Kondisi yang belum stabil ini sangat rentan terhadap peningkatan tingkat pengangguran apabila terjadi pergolakan ekonomi contohnya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kemudian tahun 2022 kondisi ekonomi mulai membaik yang ditunjukkan dengan penurunan angka pengangguran. Hal ini berlanjut hingga tahun 2023. Pemerintah tetap harus berusaha dengan menyediakan lapangan kerja secara maksimal untuk menyerap angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diminimalkan.

Perumahan

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, semakin baik pula tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga antara lain dapat dilihat status kepemilikan tempat tinggal, penggunaan listrik sebagai penerangan, air bersih sebagai sumber air minum utama, dan tersedianya jamban.

Tabel 5 Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2019 – 2023

Fasilitas Perumahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Milik Sendiri	75,67	78,17	82,52	85,50	87,22
Air untuk Mandi/Cuci/dll Leding	41,25	41,77	41,59	40,76	41,25
Jamban Milik Sendiri	82,88	84,96	87,30	88,58	89,36

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023, status penguasaan tempat tinggal milik sendiri sebanyak 87,22 persen merupakan angka tertinggi sejak lima tahun terakhir. Selain itu, 41,25 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menggunakan air leding sebagai sumber air untuk mandi/cuci/dll. Fasilitas lain yang juga berpengaruh terhadap kesehatan rumah tangga adalah keberadaan tempat buang air besar (jamban). Pada tahun 2023, terdapat 89,36 persen rumah tangga yang memiliki dan menggunakan jamban sendiri.

Pengeluaran dan Pola Konsumsi

Pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi. Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Menurut Teori Engel, peningkatan kesejahteraan suatu rumah tangga ditandai dengan meningkatnya persentase konsumsi non makanan dibandingkan makanan.

Tabel 6 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2019-2023

Tahun	Jenis Konsumsi		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	484.214	489.010	973.222
2020	504.060	514.891	1.018.951
2021	572.633	625.945	1.198.578
2022	611.334	532.332	1.143.666
2023	603.257	537.834	1.141.092

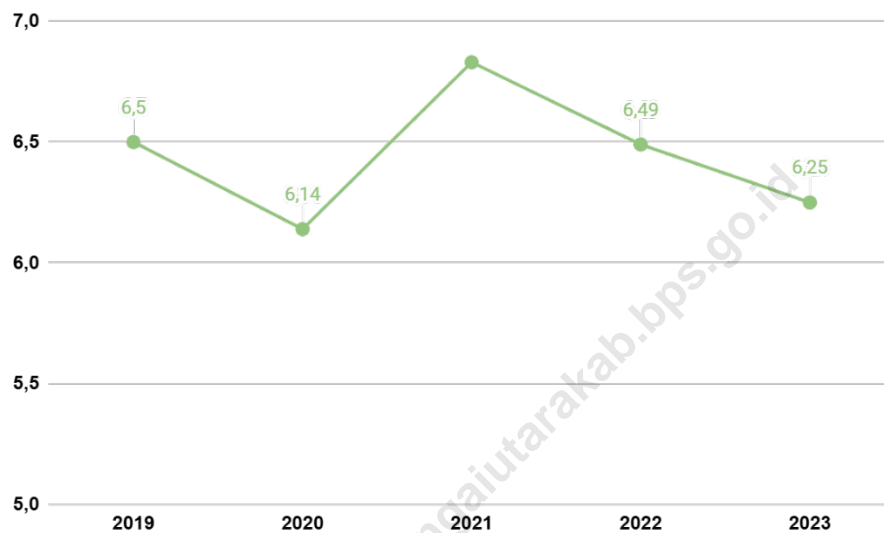
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

Selama periode 2019–2021, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan penduduk di Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga. Jika dilihat dari jenis konsumsi, ada perubahan proporsi pengeluaran terbesar. Pada tahun 2022 persentase konsumsi makanan lebih besar dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Sebaliknya pada tahun 2019–2021 dan tahun 2023 konsumsi non makanan lebih besar dibandingkan dengan konsumsi makanan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Indikator ini harus dimonitor untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang diambil telah sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 14 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2019-2023

Penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 6,50 persen. Persentase penduduk miskin kondisi Maret 2020 menurun menjadi 6,14 persen. Pandemi Covid 19 mulai terasa di Indonesia sejak Bulan April Tahun 2020, hal ini ditandai dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar pertama pada tanggal 17 April 2020. Sejak saat itu pemerintah fokus kepada penanggulangan pandemi dengan membatasi aktivitas masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan banyak sektor perekonomian khususnya sektor transportasi, perdagangan, industri dan pariwisata. Penurunan aktivitas Perekonomian tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melambat serta membuat persentase penduduk miskin meningkat. Pada tahun 2022 dan 2023, terjadi tren penurunan hingga di angka 6,25 persen

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 71,12 atau meningkat sebesar 0,79 poin dari tahun sebelumnya. Angka tersebut termasuk dalam peringkat kinerja pembangunan manusia kategori “tinggi”. Komponen-komponen pembentuk indikator IPM juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, sejak 2020, IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara menempati peringkat IPM kedua terakhir se-Provinsi Kalimantan Selatan, setelah Kabupaten Barito Kuala. Hanya angka Harapan Lama Sekolah yang cukup tinggi sedangkan Rata-rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup dan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan menempati posisi paling bawah di antara ke-13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. UHH saat Lahir penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 72,21 tahun. Komponen penyusun dimensi pendidikan yaitu RLS sebesar 7,77 tahun sedangkan HLS 13,19 tahun. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 10,491 juta rupiah per orang per tahun.

Dalam 3 tahun terakhir, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda jauh. Pertumbuhan penduduk juga tergolong sedang. Secara umum, terjadi peningkatan kondisi sosial ekonomi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di bidang kesehatan, pada tahun 2023 4 dari 5 penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persent terbawah memanfaatkan jaminan kesehatan dalam melakukan rawat jalan. Dalam bidang ketenagakerjaan, perkembangan tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif, akan tetapi menunjukkan penurunan mulai tahun 2021 hingga 2023. Sayangnya, fasilitas perumahan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan sedikit penurunan. Terdapat penurunan penggunaan air leding sebagai sumber air untuk mandi/cuci/dll. Pada 2023, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan penduduk di Hulu Sungai Utara mengalami penurunan dari tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga.

5.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan data-data yang ada, maka Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tantangan terbesar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masih

rendah. Program-program pemerintah harus dimonitoring perkembangannya dan dievaluasi hasilnya untuk mendapatkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Peningkatan di Bidang Kesehatan

Upaya peningkatan di bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki umur harapan hidup saat lahir paling rendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan di bidang kesehatan dilakukan dalam berbagai aspek dan berkesinambungan. Hal yang paling penting adalah pembudidayaan perilaku hidup bersih dan sehat oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Pemeliharaan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak menjadi faktor penting bagi kesehatan. Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh dalam penularan dan munculnya suatu penyakit. Oleh sebab itu, harus diupayakan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dari masa ke masa. Di samping itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan. Kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan ditunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain: kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, dan akses terhadap air minum yang layak, dan jenis lantai terluas.

Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan sedini mungkin dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, misalnya melalui sosial media dan iklan layanan masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat berupa kesehatan reproduksi pada remaja, pencegahan usia pernikahan dini, peningkatan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita, serta peningkatan gizi dan kesehatan ibu hamil, menyusui, dan bayi balita. Peran penting Posyandu ataupun Polindes lebih dikembangkan untuk memantau tumbuh kembang balita.

Selain itu, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kemudahan akses jalan menuju fasilitas kesehatan, peningkatan sarana pelayanan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan yang kompeten terutama dokter spesialis, serta perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Program jaminan kesehatan nasional diterapkan semaksimal dan semudah mungkin agar

masyarakat kurang mampu dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara tertib agar peningkatan kesehatan dapat tercapai.

Peningkatan di Bidang Pendidikan

Pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa. Mutu pendidikan yang baik, akan melahirkan generasi yang baik. Bila bangsa kita memiliki mutu pendidikan yang baik, perekonomian dan segala aspek pemerintahan bisa dijalankan dengan baik pula. Program-program yang ditetapkan harus fokus pada program pendidikan yang berdampak langsung terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi anggaran maupun kegiatannya.

Selain itu, peningkatan di bidang pendidikan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang bermutu dan memadai. Peningkatan fasilitas seperti ruang belajar, dapat mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar. Tenaga pendidik juga perlu mengikuti penataran/pelatihan agar dapat meningkatkan profesionalisme. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana belajar mampu melengkapi tugas guru.

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, seperti Program Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu (BOMM), Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Khusus Murid (BKM) sudah dilakukan sejak dahulu. Akan tetapi manfaatnya belum dirasa maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar program-program pemerintah tersebut dapat tepat sasaran.

Peningkatan Standar Hidup Layak

Berdasarkan data yang ada, wilayah perkotaan memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik dibandingkan wilayah perdesaan. Hal tersebut dimungkinkan karena fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi lebih terpusat di perkotaan. Untuk itu, peningkatan standar hidup layak masyarakat lebih diutamakan untuk wilayah perdesaan.

Adanya kebijakan program pembangunan yang lebih memprioritaskan pada wilayah perdesaan beserta meningkatnya anggaran dana desa untuk penyediaan dan perbaikan berbagai infrastruktur baik ekonomi maupun

aksesibilitas jalan dan sarana transportasi diharapkan juga akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan.

Tahun 2023, sebagian besar masyarakat perdesaan bekerja di sektor pertanian. Selain di sektor pertanian, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara banyak yang bekerja di sektor industri pengolahan, terutama penduduk perempuan sebagai penerima upah atas jasa pengolahannya. Program bantuan permodalan, pemberian pelatihan keterampilan bagi petani dengan ilmu dan teknologi modern yang akan meningkatkan output sekaligus efisiensi biaya produksi harus ditingkatkan

Pengurangan kemiskinan dan pengangguran harus selalu ditingkatkan. Pengangguran mengurangi pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran seseorang. Berbagai program yang sudah dijalankan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran harus selalu dimonitoring dan dievaluasi agar kebijakan dapat tepat sasaran. Penciptaan lapangan kerja yang padat karya dapat menjadi salah satu solusi yang dapat menekan kedua angka tersebut.

Selain itu peningkatan dimensi standar hidup layak juga dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan pengeluaran masyarakat. Dapat dengan cara memberikan sarana masyarakat untuk membelanjakan uangnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, misalnya dengan mengadakan event seperti Amuntai expo dan sejenisnya dengan penjual yang berasal dari penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyediakan/mengatur izin untuk waralaba di jalan utama lintas provinsi, dan mempercepat belanja daerah. Diversifikasi produk yang diperjualbelikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dapat mendorong peningkatan pengeluaran masyarakat.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Jl. H. Saberan Effendi RT. 3, Sungai Malang, Amuntai, 71418
Telp/Fax. (0527) 61049 Email: bps6308@bps.go.id
Homepage : <http://hulusungaiutarakab.bps.go.id>